

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tekanan terhadap kawasan konservasi terus meningkat sejak reformasi akibat dari melonggarnya kontrol negara sekaligus meningkatnya tekanan penduduk. Dalam jangka panjang tekanan tersebut jika dibiarkan akan mengganggu kelestarian kawasan konservasi sehingga mengganggu keseimbangan alam. Saat ini banyak tindakan-tindakan berunsur kriminalitas yang merugikan dan berpotensi merusak lingkungan yang datangnya baik dari pendatang maupun masyarakat lokal. Berlanjutnya tekanan tak bisa dilepaskan dari strategi pembangunan kita yang belum bergeser dari *natural resources based economic* menjadi *innovations based economic* sehingga eksploitasi terhadap sumberdaya alam tetap berlangsung.

Desakan ekonomi dan sulitnya mengakses sarana produksi pertanian membuat mereka tidak dapat bertahan di dalam usaha pertaniannya, hal itu mendorong mereka untuk berpindah ke hutan, sehingga upaya yang dilakukan yaitu penebangan pohon pada kawasan yang dilindungi dan dilakukan secara kelompok. Pengawasan terhadap kawasan konservasi tidak semakin diperketat karena pengelolaan ditangani oleh masyarakat yang bebas melakukan tindakan yang mendorong kerusakan lingkungan. Akibatnya para petugas / polhut tidak memiliki wewenang yang kuat dalam mempertahankan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan konservasi. Dalam jangka panjang hal tersebut akan meningkatkan ekstraksi terhadap sumberdaya alam terutama *common pool resources* seiring peningkatan pertumbuhan manusia. Konflik pengelolaan sumberdaya alam tidak bisa dihindari jika tidak ada model alternatif pengembangan ekonomi yang tidak berbasis pada eksploitasi sumberdaya alam.

Berbagai macam pendekatan untuk menyeimbangkan aktivitas eksploitasi dan investasi lingkungan telah ditempuh untuk mengamankan kawasan konservasi. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam perbaikan infrastruktur konservasi tidak sepenuhnya efektif terhadap masalah kerusakan lingkungan yang ada, di samping itu aktivitas ekonomi masyarakat lokal terus mengancam keberadaan tanaman hutan. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan yaitu CBRM (*community based resources management*) berbasis *co-management* dimana masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan kehutanan termasuk kawasan konservasi telah diimplementasikan. Bahkan

usaha reforestasi melalui dana reboisasi (*reboisation fund*) yang pada masa lalu ternyata tidak memberikan dampak apa-apa pada pengelolaan kelestarian hutan. REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) dan REDD+ bahkan REDD++ pun dirasakan masih belum mampu memberikan jawaban atas tingginya laju kerusakan kawasan konservasi kita.

Melihat situasi sosial yang krisis kesadaran lingkungan dan minimnya pengetahuan terkait konservasi lingkungan, membuat masyarakat jauh dari nilai-nilai lokalitas yang ada. Masyarakat perlu akses terhadap pendidikan dan pekerjaan-pekerjaan konservasi yang dianggap penting untuk mengatasi masalah banjir, sampah, erosi, dan longsor. Pengetahuan akan konservasi menjadi salah satu faktor penentu untuk mendorong masyarakat lebih memperhatikan kelangsungan ekosistem yang ada di sekitarnya. Dengan adanya akses pekerjaan konservasi baik itu melalui organisasi jasa, wisata, kelompok tani, atau balai milik pemerintah, maka pekerjaan konservasi dapat menjadi suatu unit usaha berkelanjutan masyarakat lokal yang memberikan manfaat ekonomi dan mengedepankan pemeliharaan sumberdaya alam.

Upaya-upaya untuk mengkomoditikan jasa lingkungan sebagai barang yang harus dibayar pengguna sangat sulit untuk diterapkan. GDP (*Gross Domestic Product*) hijau sebagai misal juga masih pada tarap simulasi perhitungan sementara implementasi masih memerlukan kerja ilmiah juga politik yang cukup panjang. Salah satu kelemahan strategi konservasi tersebut adalah tidak adanya mekanisme pemupukan dana konservasi secara lebih mandiri ditingkat komunitas sehingga pembiayaan konservasi menjadi tidak berkelanjutan.

Selama ini program-program pemberdayaan sifatnya sangat konvensional hanya sebatas "*charity*" sehingga tidak banyak memberi dampak bagi masyarakat selain tidak berkesinambungan. Artinya, pada saat tahun program habis aktivitas-aktivitas konservasi tidak berlanjut karena tidak ada mekanisme "otomatis" dari masyarakat untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas konservasi sebagaimana yang diajarkan program. Pendekatan yang dilakukan belum pada level mengorganisir kelompok, tetapi masih sebatas sosialisasi di kalangan tertentu. Pemberdayaan pada masyarakat daerah hutan perlu dilakukan secara partisipatif dengan pendekatan kultural yang kuat, sehingga pemberdayaan pada masyarakat daerah hutan tidak ada unsur praktis yang semata-mata hanya menyerap manfaat ekonomi.

Pemberdayaan secara partisipatif harus bergerak dari bawah dan atas dasar keinginan masyarakat bawah, dengan itu upaya pengembangan modal dasar konservasi dapat berjalan secara efektif. Modal dasar konservasi harus tepat sasaran dan efisien agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Modal penerapan pertanian konservasi dapat berupa fisik maupun materiil. Pengadaan modal konservasi berupa fisik terkadang masih terjadi masalah, yang menjadi salah satu penyebab utama adalah ketiadaan mekanisme pemupukan dana konservasi berkelanjutan di kawasan konservasi sebagai bagian integral program-program konservasi.

Skema pembiayaan konservasi seringkali dikelola terpusat dengan pendanaan besar-besaran sehingga rawan penyelewengan. Program-program seringkali generik dan dianggap berlaku secara nasional sehingga kerja-kerja konservasi yang bersifat lokal tetapi memiliki dampak besar pada kelestarian lingkungan tidak tersentuh. Tidak adanya pemilahan tanggung jawab kerja-kerja konservasi antara pengelola program dengan masyarakat mendorong masing-masing pihak saling melempar tanggung jawab terutama paska program. Masalah pendanaan biasanya menjadi kendala utama karena paska program masyarakat diharapkan mandiri mengelola aktivitas-aktivitas konservasi tersebut. Ketidadaan sumber pendanaan yang berkelanjutan menjadikan aktivitas konservasi menjadi terhenti.

Mengambil tiga kawasan agro-ekologi umum Jawa Timur (dataran tinggi, dataran sedang, dan dataran rendah) sebagai fokus kegiatan, kami menawarkan model pemupukan modal dasar konservasi berbasis komunitas. Model ini merupakan upaya pemupukan dana abadi yang akan dijadikan modal dasar konservasi (MDK) bagi kelestarian lingkungan berkelanjutan. MDK yang terbangun selanjutnya diarahkan untuk mendukung keberlanjutan aktivitas-aktivitas konservasi. Pemupukan dana konservasi yang berkelanjutan memberikan jaminan pembiayaan atas kegiatan-kegiatan masyarakat terkait dengan konservasi sehingga konservasi menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Tidak hanya sekedar pemupukan dana konservasi, model ini juga menawarkan “pelembagaan” budaya dan praktik konservasi dimana konservasi dan kegiatan kegiatan budaya, sosial, dan ekonomi tidak terpisah satu sama lain.

Model ini dibangun untuk membangun MDK dengan jalan tidak mengeksploitasi proses kapitalisasi jasa lingkungan sebagaimana yang dikembangkan oleh program REDD atau REDD+. *Eco-tourism* meskipun diklaim

sangat ramah terhadap lingkungan tetap juga membebani kawasan konservasi pada taraf tertentu terutama taman nasional dan hutan wisata. Oleh karena itu, model ini lebih memanfaatkan potensi keswadayaan masyarakat baik *cash* maupun *non cash* serta potensi dari para pelaku ekonomi aktif pedesaan untuk bersama membangun mekanisme pembiayaan konservasi dengan membangun Modal Dasar Konservasi (MDK). MDK merupakan modal dasar untuk membiayai usaha-usaha konservasi secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan *support* dasar konservasi yang mendukung implementasi konservasi dan kelestarian lingkungan belum teridentifikasi di suatu kawasan.
2. Potensi-potensi keswadayaan masyarakat baik *cash* maupun *non cash* yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan kelestarian lingkungan belum teridentifikasi dan digali
3. Potensi-potensi bidang-bidang yang dapat digali untuk pembiayaan pertanian konservasi dan kelestarian lingkungan belum diidentifikasi dan diukur besarnya dalam satu kawasan.
4. Sistem pembiayaan pengelolaan konservasi berkelanjutan yang mandiri dan berbasis pada potensi lokal belum terumuskan.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah:

1. Merumuskan Instrumen identifikasi dan analisis kegiatan-kegiatan *support* dasar konservasi apa yang paling menentukan atau mendukung kelestarian lingkungan suatu desa.
2. Merumuskan instrumen identifikasi dan analisis potensi *cash* dan *non-cash* masyarakat desa yang potensial dimanfaatkan sebagai pendukung aktivitas-aktivitas dasar konservasi.
3. Merumuskan instrumen identifikasi dan analisis kelayakan peluang-peluang pemanfaatan potensi lingkungan sumber pemupukan modal dasar konservasi berkelanjutan, serta;
4. Membangun sistem pengelolaan konservasi berkelanjutan untuk membiayai kegiatan-kegiatan *support* dasar konservasi yang diperlukan oleh masyarakat.

1.4. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini pada dasarnya adalah terbangunnya lembaga pengelola MDK yang mandiri dan berkelanjutan di desa-desa di Jawa Timur. Dengan adanya mekanisme tersebut maka proses-proses pemeliharaan lingkungan tetap dilakukan masyarakat meskipun program ini telah berakhir. Secara rinci keluarannya adalah sebagai berikut:

1. Terbangunnya instrumen identifikasi dan analisis kegiatan-kegiatan *support* dasar konservasi,
2. Terbangunnya instrumen identifikasi dan analisis potensi *cash* dan *non cash* masyarakat untuk konservasi,
3. Terbangunnya instrumen identifikasi dan analisis peluang-peluang pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan Modal Dasar Konservasi (MDK),
4. Manual prosedur kerja dari lembaga Modal Dasar Konservasi (MDK) untuk kelestarian lingkungan berkelanjutan di Jawa Timur.

Jadi, kegiatan ini merupakan aktivitas implementasi sekaligus konstruksi metode pelaksanaan untuk membuat prosedur operasional agar model yang sama dikembangkan pada desa-desa lain.

1.5. Ruang Lingkup

1. Melakukan survei untuk mengidentifikasi jenis-jenis aktivitas *support* dasar lingkungan yang perlu dan wajib dikerjakan oleh komunitas tetapi tidak ditangani dengan baik oleh komunitas baik secara pribadi maupun kelompok beserta jumlah pembiayaannya.
2. Melakukan survei potensi keswadayaan/kemauan membayar atau berkorban baik *cash* maupun *non cash* untuk pembiayaan aktivitas *support* dasar konservasi yang tidak ditangani oleh pribadi maupun kelompok.
3. Melakukan survei pelaku-pelaku ekonomi aktif di kawasan sebagai sumber potensial penggalangan pembiayaan melalui mekanisme hibah atau CSR juga pihak-pihak terkait seperti NGO dan pemerintah.
4. Melakukan survei potensi-potensi usaha lokal yang memiliki benefit tinggi dan resiko rendah di kawasan sebagai sasaran investasi dari dana konservasi yang telah digalang.
5. Memfasilitasi masyarakat membangun sistem pendanaan konservasi berkelanjutan melalui FGD.